



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



# **DUKUNGAN PEMANFAATAN BOK DALAM PENCEGAHAN STUNTING**

**KUWAT SRI HUDOYO  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT**

**Jakarta, 14 November 2018**

# JUKNIS BOK

- **DASAR HUKUM :**

**PERATURAN PEMERINTAH NO 55 TAHUN 2005  
TENTANG DANA PERIMBANGAN pasal 59**



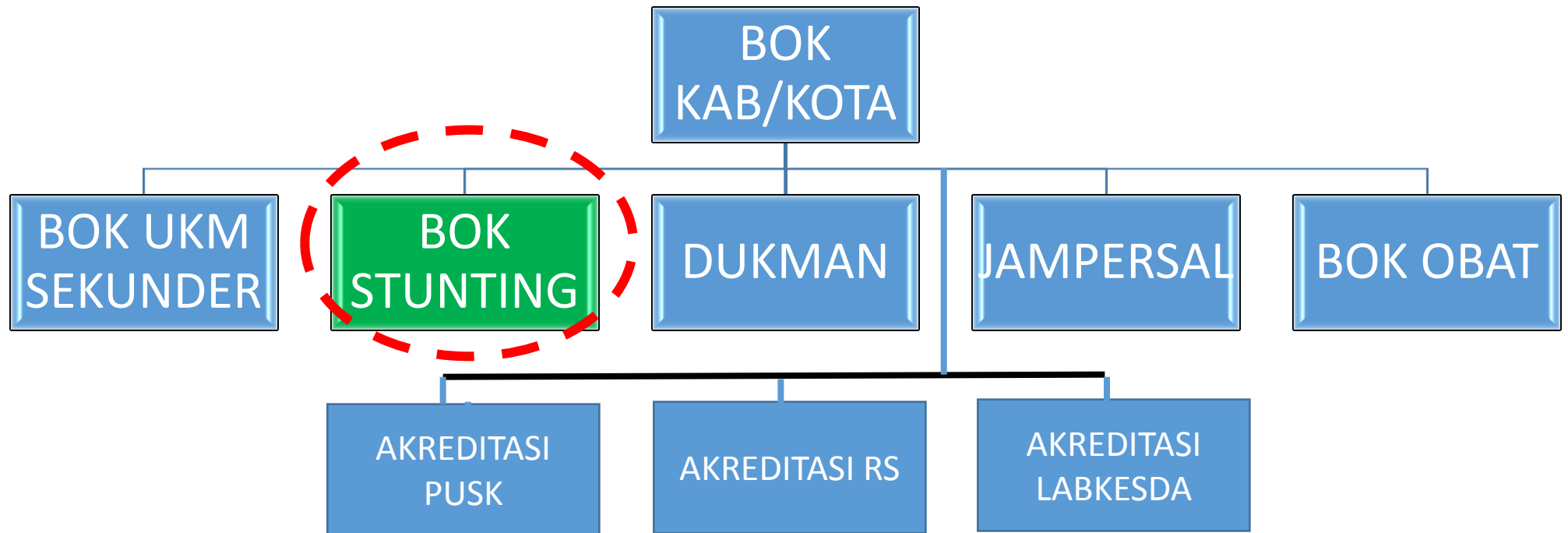
Peraturan Menteri Kesehatan tentang  
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Non Fisik  
Bidang Kesehatan merupakan amanat pp 55  
th 2005

# AMANAT PP NO 55 TH 2005

- Pasal 59

- (1) Berdasarkan penetapan alokasi DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, **MENTERI TEKNIS MENYUSUN PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK.**
- (2) Petunjuk Teknis Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

# JENIS BAANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN



# BOK STUNTING

# TUJUAN

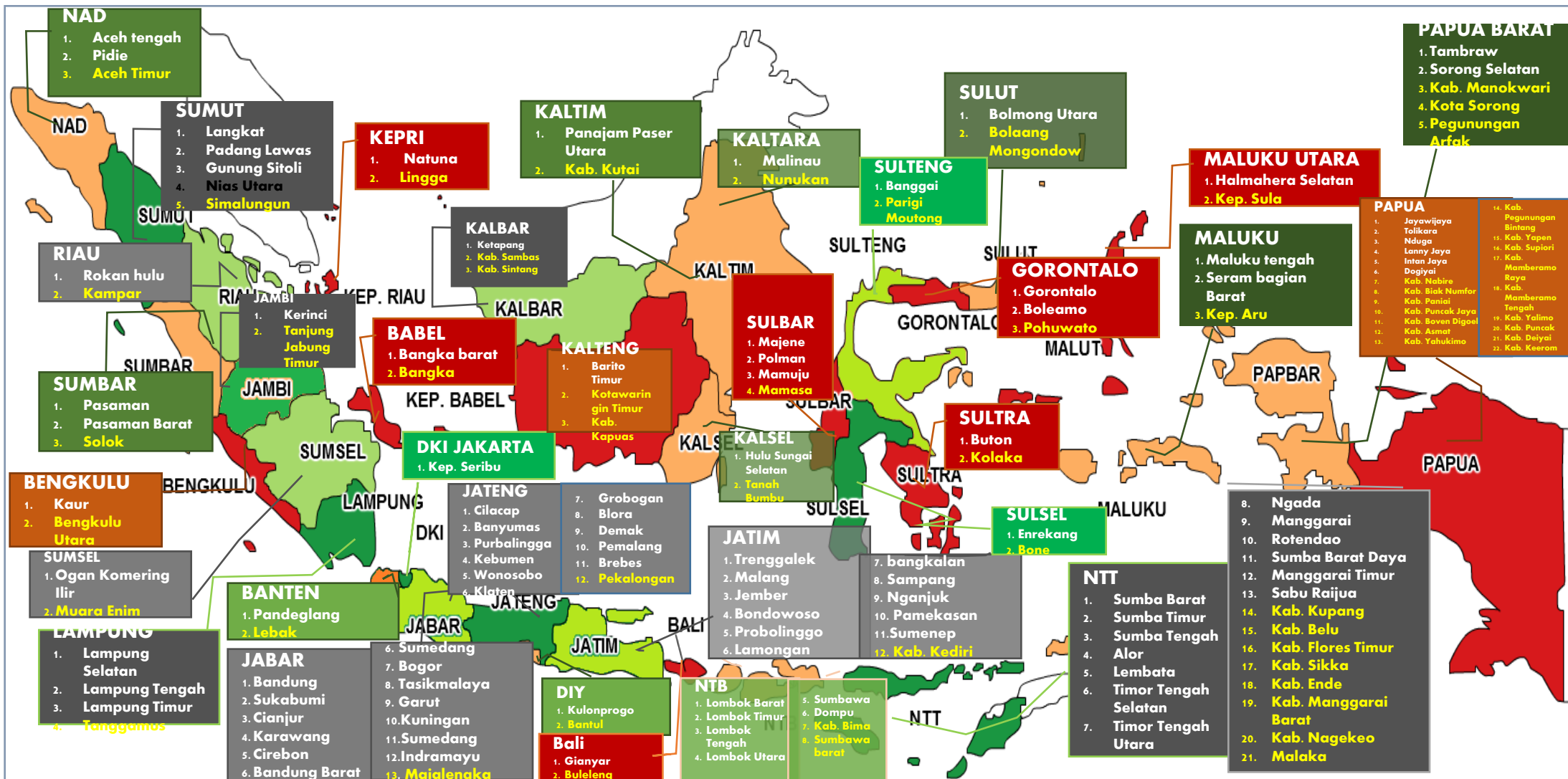
## Umum

Meningkatkan peran multi sektor dalam Percepatan penurunan prevalensi stunting

## Khusus

1. Terselenggaranya konvergensi, koordinasi dan konsolidasi perencanaan, penggerakan pelaksanaan percepatan penurunan prevalensi stunting
2. Terlaksananya intervensi penanganan stunting
3. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi

# LOKUS 160 KAB/KOTA PENURUNAN STUNTING 2018-2019



# BESARAN ALOKASI PERKABUPATEN

**RP 750.000.000,-**



# PENGGUNAAN BOK STUNTING DI KABUPATEN/KOTA

1. Koordinasi, konvergensi lintas program, lintas Sektor
2. Penyediaan data sasaran program
3. Identifikasi intervensi spesifik dan sensitif
4. Penyusunan Rencana aksi daerah
5. Penguatan, penggerakan pelaksanaan, intervensi spesifik dan sensitive di desa lokus

# PENGGUNAAN BOK STUNTING DI KABUPATEN/KOTA

6. Monitoring dan evaluasi lintas program dan multi sektor sampai ke Puskesmas lokus dan desa lokus
7. Pencatatan pelaporan (termasuk dokumentasi) intervensi dan hasil
8. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka penurunan stunting
9. Orientasi strategi komunikasi perubahan perilaku, PMBA, STBM, KIA
10. Kegiatan lain sesuai kebutuhan daerah

# JENIS PEMBIAYAAN BOK STUNTING

1. Belanja transport local
2. Belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah
3. Belanja bahan pakai habis
4. Belanja material
5. Belanja makan dan minum
6. Belanja pertemuan
7. Belanja penggandaan dan percetakan
8. Belanja honor pns dan non pns
9. Belanja barang dan jasa lainnya sesuai kebutuhan

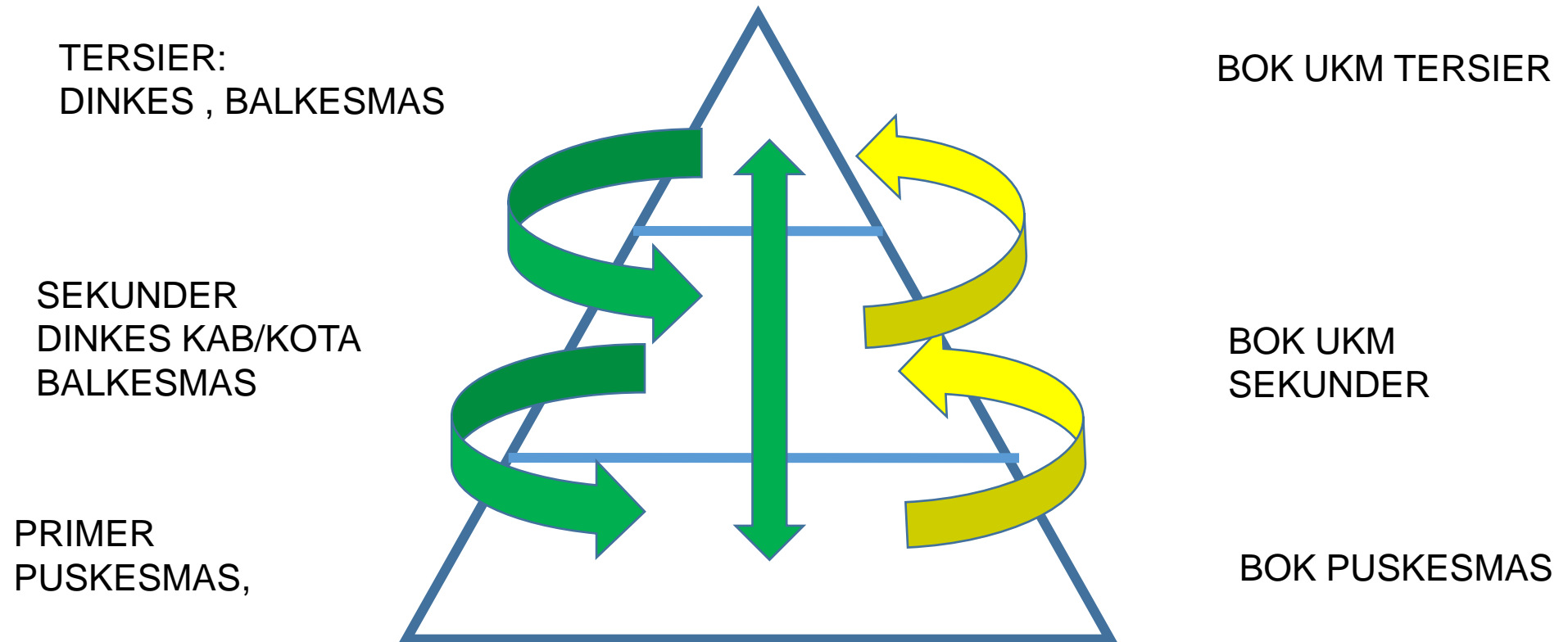
# DAK FISIK PENUGASAN STUNTING

# DAK FISIK PENUGASAN STUNTING 2019

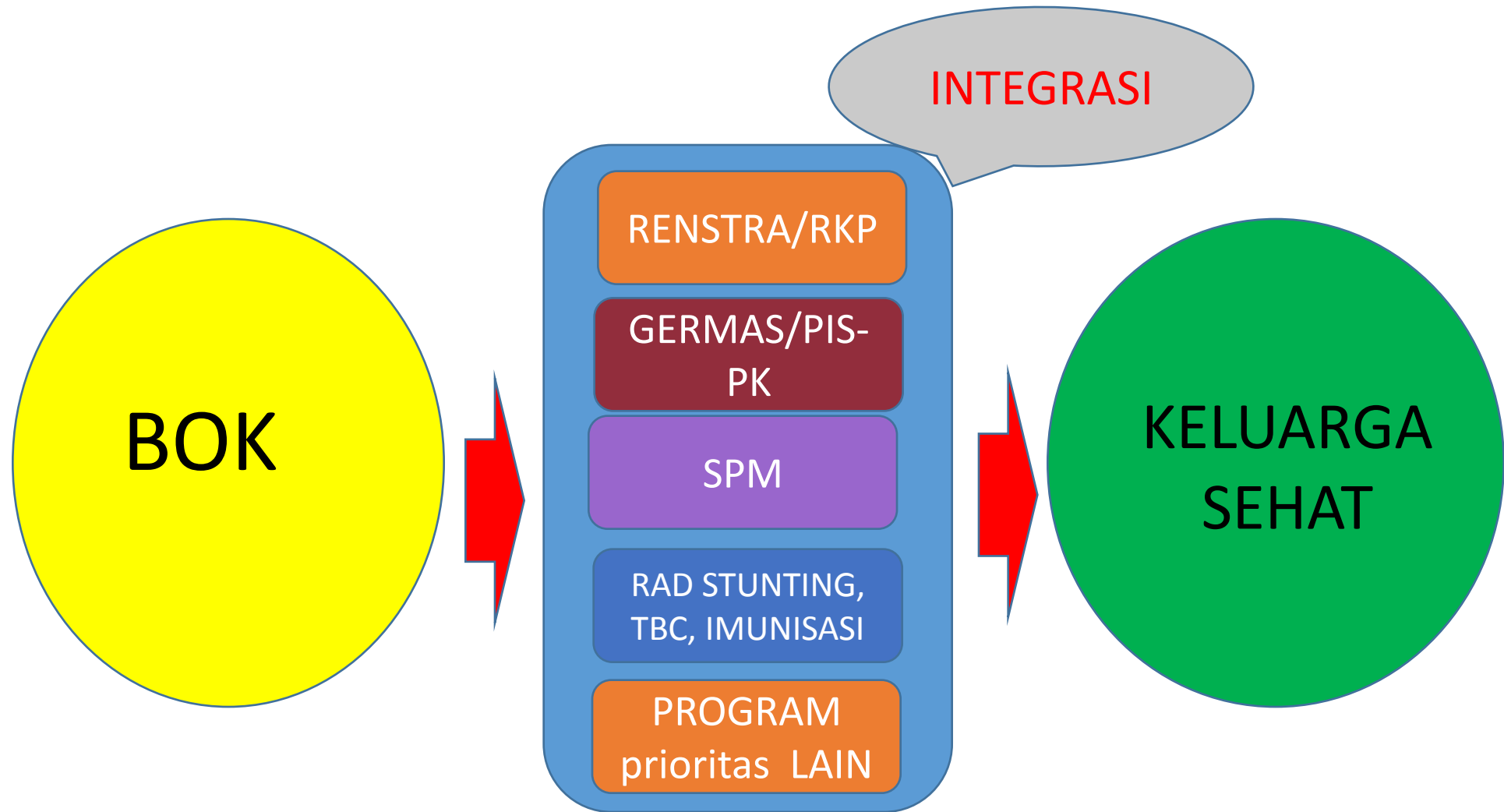
1. **PMT BUMIL KEK** diadakan di Provinsi untuk 160 kab/kota total Rp. 108.350.781.826 ada 4 provinsi yang tidak mengusulkan yaitu:
  - a) Nusa Tenggara Timur,
  - b) Jawa Barat,
  - c) Sulawesi Selatan
  - d) Aceh
2. **SANITRIAN KIT** diadakan untuk puskesmas di 160 kab/kota lokus stunting dengan total alokasi Rp. 196.000.000.000,- ada 28 kab/kota yang tidak mengusulkan
3. **CETAKAN JAMBAN** diadakan untuk puskesmas 160 kab/kota lokus stunting dengan total alokasi Rp. 14.791.000.000,- ada 44 kab/kota yang tidak mengusulkan
4. **ANTROPOMETRI KIT** diadakan untuk puskesmas di 160 kab/kota lokus stunting dengan total alokasi Rp.109.401.594.980,-, ada 11 kab/kota yang tidak mengusulkan
5. **KESLING KIT** diadakan untuk 160 kab/kota lokus stunting dengan total alokasi Rp. 40.950.000.000, ada 44 kab/kota yang tidak mengusulkan

# **BOK UNTUK PENGUATAN UKM**

# BOK UNTUK UKM



# DUKUNGAN BOK





# JENIS BOK PENGUATAN UKM

- **BOK PUSKESMAS**
- **BOK KABUPATEN ( UKM SEKUNDER, DUKMAN, JAMPERSAL)**
- **BOK PROVINSI (UKM TERSIER)**

# PENGGUNAAN DI PUSKESMAS

1. Program Indonesia Sehat melalui **PENDEKATAN KELUARGA**
2. **UKM esensial dan UKM pengembangan** termasuk pendukung kegiatan, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama lintas sektor
3. Pelaksanaan Fungsi **MANAJEMEN PUSKESMAS** (P1,P2 dan P3 )
4. Dukungan operasional UKM yang dilaksanakan oleh Tim **NUSANTARA SEHAT** → Pelayanan kesehatan keluar gedung;dan sewa rumah tinggal
5. Kegiatan untuk mewujudkan **desa STBM**; dan

# PENGGUNAAN DI PUSKESMAS

1. Kegiatan UKM lainnya untuk Stunting, Eliminasi , Eradikasi, Pembasmian Penyakit tertentu di wilayah Lokus yang telah ditetapkan
2. Dukungan Operasional Surveillance terpadu Gizi, KIA, penyakit menular
3. Dukungan Penyediaan PMT pemulihan local
4. Dukungan Perubahan Perilaku melalui edukasi PMBA dan Ibu Hamil
5. Dukungan Kegiatan Orientasi Kader Posyandu, Posbindu, Pos UKK, Poskestren
6. Penyediaan **tenaga dengan perjanjian kerja t.a promosi kesehatan/Kesling/Gizi/Kesmas lainnya/pembantu Pengelola keuangan maksimal 4 tenaga kontrak**

# JENIS PEMBIAYAAN BOK PUSKESMAS

## YANG BOLEH

1. Belanja Transport petugas kesehatan dan kader serta lintas sektor
2. Belanja Perjalanan dinas dalam dan luar daerah
3. Belanja bahan pakai habis
4. Belanja material pendukung kegiatan
5. Belanja pencetakan dan penggandaan
6. Belanja makan dan minum rapat
7. Belanja kegiatan pertemuan
8. Belanja honor
9. Belanja barang dan jasa lainnya yang dibutuhkan sesuai perturan yang berlaku ( contoh iuran JKN, jasa pengiriman dll )

## TIDAK BOLEH

1. Belanja Modal,
2. Kegiatan kuratif dan rehabilitative,
3. Pengadaan obat, vaksin, alat kesehatan,
4. Retribusi,
5. Pemeliharaan bangunan, kendaraan,
6. Sarana dan prasarana

# **PENGGUNAAN UKM SEKUNDER DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN/ KOTA**

1. Penguatan dan percepatan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS\_PK)
2. Rujukan pengujian sample kesehatan masyarakat (Ketika UKM Primer tidak mampu melakukan pemeriksaan baik dalam tenaga, sarana prasarana maupun teknologi) termasuk yang dilaksanakan oleh Balai Kesehatan Masyarakat sebagai UPT Dinas Kesehatan Kabupaten dan kota
3. Fasilitasi tenaga, prasarana, dan teknologi dukungan UKM ke Puskesmas
4. Pembinaan dan Bimbingan Teknis terpadu UKM Primer termasuk menghadiri kegiatan lokakarya mini Puskesmas
5. Kampanye, sosialisasi, advokasi perilaku hidup sehat di tingkat kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat
6. Penyediaan tenaga kontrak sebagai fasilitator STBM kabupaten dan dukungan operasionalnya
7. Koordinasi Terpadu lintas program/lintas sektor bidang kesehatan termasuk dengan Puskesmas

# JENIS PEMBIAYAAN UKM SEKUNDER DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

1. Belanja transport lokal
2. Belanja perjalanan dinas dinas dalam dan luar daerah
3. Belanja pembelian bahan habis pakai
4. Belanja penggandaan dan pencetakan
5. Belanja pembelian material pendukung kegiatan UKM sekunder
6. Belanja kegiatan pertemuan /meeting
7. Belanja makan dan minun kegiatan rapat-rapat
8. Belanja honor tenaga termasuk fasilitator kesehatan lingkungan di Kabupaten
9. Belanja barang dan jasa lainnya sesuai kebutuhan berdasar peraturan yang berlaku (contoh iuran JKN)

# PENGGUNAAN UKM TERTIER DI DINAS KESEHATAN PROVINSI

1. Penguatan dan percepatan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) di wilayah provinsi
2. Rujukan pengujian sample kesehatan masyarakat (Ketika UKM Primer tidak mampu melakukan pemeriksaan baik dalam tenaga, sarana prasarana maupun teknologi) termasuk yang dilaksanakan oleh Balai Kesehatan Masyarakat sebagai UPT Dinas Kesehatan Kabupaten dan kota
3. Fasilitasi tenaga, prasarana, dan teknologi dukungan UKM ke kabupaten dan Puskesmas
4. Koordinasi Terpadu lintas program/lintas sektor bidang kesehatan termasuk dengan Puskesmas
5. Pembinaan dan Bimbingan Teknis terpadu UKM Primer termasuk menghadiri kegiatan Minilokakarya Puskesmas
6. Kampanye, sosialisasi, advokasi perilaku hidup sehat di tingkat provinsi dan pemberdayaan masyarakat
7. Dukungan Manajemen Satker

# JENIS PEMBIAYAAN UKM TERTIER DI DINAS KESEHATAN PROVINSI

1. Belanja transport lokal
2. Belanja perjalanan dinas dinas dalam dan luar daerah
3. Belanja pembelian bahan habis pakai
4. Belanja penggandaan dan pencetakan
5. Belanja pembelian material pendukung kegiatan UKM sekunder
6. Belanja kegiatan pertemuan /meeting
7. Belanja makan dan minun kegiatan rapat-rapat
8. Belanja honor
9. Belanja barang dan jasa lainnya sesuai kebutuhan berdasar peraturan yang berlaku (contoh iuran JKN)



# DUKUNGAN MANAJEMEN BOK DAN JAMPERSAL DINAS KES KAB/KOTA

---

## PENGGUNAAN

1. Pengelolaan satuan kerja
2. Sosialisasi BOK dan jampersal
3. Pembinaan pengelolaan BOK di Puskesmas
4. Kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi
5. Dukungan administrasi

## JENIS PEMBIAYAAN

1. Belanja transport local
  2. Belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah
  3. Belanja bahan pakai habis
  4. Belanja material
  5. Belanja makan dan minum
  6. Belanja pertemuan
  7. Belanja penggandaan dan percetakan
  8. Belanja honor
  9. Belanja barang dan jasa lainnya sesuai kebutuhan
-

# JAMINAN PERSALINAN/JAMPERSAL

Pengelolaan Dana Jampersal tetap di Kab/Kota

## PENGUNAAN

1. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten

Seluruh ibu hamil yang membutuhkan

2. Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK)

~~3. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risti, KB pasca salin dan perawatan bayi baru lahir~~

Ibu hamil miskin, tidak mampu dan tidak memiliki Jaminan Kesehatan

# JENIS PEMBIAYAAN JAMPERSAL

1. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
2. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
3. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup: 1) Sewa rumah, 2) Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK, 3) Langganan air, listrik, kebersihan;
4. Jasa pelayanan/pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan klas 3 mengacu pada Jaminan Kesehatan Nasional

Dana Jampersal **tidak boleh** dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin serta bayar iuran/premi.

**TERIMA KASIH**